

JADWAL PIALA DUNIA 2026

Jumat (12/6) WITA, Live: TVRI

Grup A:

Meksiko vs Afrika Selatan



Mexico City Stadium,
Pukul 03.00 WITA

Grup A:

Korea Selatan vs Ceko



Guadalajara Stadium,
pukul 10.00 WITA



FIFA

FIFA WORD CUP 2026 Timnas Iran Tebar Ancaman

JAKARTA -GP- Timnas Iran mengancam akan menghentikan pertandingan mereka di Piala Dunia 2026 apabila terdapat bendera yang tidak diakui pemerintah Iran atau terdengar nyanyian dan slogan yang dianggap menyerang tim nasional di dalam stadion. Peringatan tersebut disampaikan Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali, dan dikutip sejumlah media Iran di tengah gelombang kritik terhadap keikutsertaan timnas negara itu dalam Piala Dunia 2026.

■ Bersambung ke Hal.2



MBG Sekolah Elit Dicoret

JAKARTA -GP- Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengevaluasi penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bagi kelompok sekolah elite. Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah penajaman sasaran (refocusing) ini diambil agar anggaran negara diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Selama ini, lanjut dia, MBG diberikan untuk seluruh anak sekolah, tanpa memandang sekolah tersebut masuk dalam golongan bawah, menengah ataupun atas. Baca Juga: Soroti Moratorium MBG dan Polemik BGN, Jupnas Gizi Pertanyakan Tata Kelola Program "Iya benar (penataan kembali). Maksudnya yang mampu, yang kaya. Jadi, nanti misalnya sekolah-sekolah kaya," ujarnya.

■ Bersambung ke Hal.2



DISWAY

Oleh: Dahlan Iskan

Mati Lumbung

DARI 10 pengusaha batu bara, yang nakal ada 15. Begitulah sindiran yang sudah lama ditujukan untuk kalangan bisnis emas hitam itu. Saya pun ikut terpengaruh. Kalau ada teman pengusaha dari Tiongkok yang perlu batu bara saya ingatkan untuk hati-hati. Lalu saya ceritakan humor penuh sindiran itu. Jenis kenakalannya tidak terhitung.

Inilah jenis komoditas berwarna hitam yang melibatkan segala jenis kejahatan yang pernah ada di dunia hitam. Korbannya tidak hanya pembeli di luar negeri. Juga pembeli dalam negeri. Bahkan pemerintah sendiri: under invoicing, transfer pricing,

■ Bersambung ke Hal.2



LAPORAN KEUANGAN MASJID RAYA- GORONTALO ISLAMIC CENTRE	
Saldo tanggal 29 Mei 2026	
Bank Muamalat	Rp 3.158.290.120
Bank BSG	Rp 355.881.552
Total Saldo	Rp 3.514.171.672
Total pertambahan saldo selama 23 s/d 29 Mei 2026	
	Rp 48.490.524

PRABOWO KE GORONTALO LAGI

Diagendakan Hadiri Puncak PENAS XVII

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto yang dipadatkan dengan kunjungannya ke Luar Negeri, memastikan tetap akan ke Gorontalo lagi.

Kepala negara dijadwalkan hadir pada Puncak Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan ke-XVII di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo pada 24 Juni 2026, mendatang.

■ Bersambung ke Hal.2



(FOTO: DOK/PEMROVI)

KE GORONTALO LAGI : Presiden Prabowo Subianto saat berada di Gorontalo pada peresmian Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo, bulan lalu. Bulan ini, Prabowo diagendakan kembali ke Gorontalo pada acara Penas XVII di Limboto.

Tunjangan Guru Non-ASN Naik

JAKARTA -GP- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non ASN dan ASN. Ia mengatakan hal ini merupakan bentuk Presiden Prabowo untuk mendorong kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan hingga pengembangan kompetensi guru. "Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangan dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangan sebesar gaji pokok," kata Mu'ti di Istana Kepresidenan, Kamis, 11 Juni 2026.

■ Bersambung ke Hal.2

BISNIS PANGAN ILEGAL

Sempat Buron, Terpidana Diringkus Kejati



(FOTO: ISTIMEWA)

PENANGKAPAN terpidana kasus bisnis bahan pangan olahan dalam kemasan illegal oleh Kejati Gorontalo.

GORONTALO - Setahun menjadi buronan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Pria inisial EU alias Endi terpidana kasus bisnis bahan pangan olahan dalam kemasan illegal akhirnya diamankan di kediamannya yang berada di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa (9/6/) sekitar pukul 14.00 Wita.

Sebelum drama penangkapan terjadi, jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Bone Bolango telah melayangkan panggilan secara patut sebanyak tiga kali.

Namun panggilan tersebut tidak diindahkan sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun 2025 lalu.

■ Bersambung ke Hal.2

Prabowo ke Gorontalo Lagi

dari halaman 1

Sebelumnya, pada 17 Juni 2026 nanti, Presiden Prabowo diagendakan bertolak ke Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin, dalam rangkaian acara KTT ASEAN-Rusia yang berlangsung di Kazan.

Kepastian kunjungan Presiden Prabowo ke Gorontalo tersebut diperoleh usai panitia pusat, provinsi dan kabupaten menggelar rapat bersama, Kamis (11/6). Dikutip dari laman resmi Pemprov

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan, pembukaan acara PENAS ke-XVII akan digelar pada tanggal 20 Juni 2026. Acara akan dibuka oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir pada puncak acara tanggal 24 Juni 2026. “Kami mendapat konfirmasi dari panitia pusat bahwa yang akan hadir membuka acara Pak Menteri Pertanian. Nanti tanggal 24 pada puncak acara Bapak Presiden dijadwalkan akan hadir,”

Kata Gubernur Gusnar. Kabar kehadiran Presiden Prabowo ini disambut baik oleh pemerintah provinsi. Kehadiran orang nomot satu di Republik Indonesia itu dipandang selalu menjadi berkah bagi daerah yang dikunjungi.

“Baru bulan Mei kemarin Pak Presiden datang ke Gorontalo dan kita mendapat banyak berkahnya. Ada banyak bantuan dan program yang masuk. Jadi kami berharap kali ini di acara PENAS dan kami tuan rumah, Pak Presiden berkenan hadir lagi,”

harap Gubernur Gusnar.

PENAS Petani dan Nelayan ke-XVII akan digelar pada 20-25 Juni 2026. Lokasinya di GOR David-Tonny Kecamatan

Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 13.000 petani, nelayan, penyuluh dan kepala daerah dijadwalkan datang menghadiri dan meramaikan acara. **(tro)**

MBG Sekolah Elit Dicoret

dari halaman 1

Selain penyesuaian sasaran penerima manfaat, katanya, pemerintah juga tengah membahas aspek efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, rincian mengenai langkah efisiensi yang akan diterapkan masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan.

Nanik mengemukakan program MBG akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil,

ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, lanjut Nanik, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditanggihkan.

Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.**(antara/jpnn)**

Tunjangan Guru Non-ASN...

dari halaman 1

Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan tersebut yang disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulannya.

Menurut Abdul Mu’ti , hal ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan tata kelola yang lebih sederhana dan efektif.

“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ungkapnya.

Di samping peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat kualitas para tenaga pendidik melalui program beasiswa bagi guru.

Abdul Mu’ti menuturkan program tersebut juga dijalankan melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

“Tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau

S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menuturkan bahwa program tersebut masih akan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan alokasi sejumlah 150.000 guru dengan nominal beasiswa yang tetap sama.

“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru,” jelasnya.

Bagi Presiden Prabowo, guru bukan sekadar profesi, melainkan pilar utama pembentukan generasi bangsa.

Oleh karena itu, investasi pada kesejahteraan dan kualitas guru merupakan investasi strategis untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju kemajuan. **(disway)**

Sempat Buron, Terpidana...

dari halaman 1

Menindaklanjuti permohonan bantuan pencarian dan penangkapan dari Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Tim Tabur Kejati Gorontalo kemudian melakukan pelacakan intensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat.

Kerja sama tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah keberadaan terpidana berhasil diketahui dan dilakukan pengamanan.

Sepekan sebelum penangkapan, pergerakan terpidana terus dipantau. “Pada Selasa (9/6/) sekitar pukul 14.00 Wita kita amankan dan dibawa ke kantor Kejati Gorontalo, dilakukan pemeriksaan fisik serta psikis selanjutnya dibawa ke Lapas Kelas IIA Gorontalo,”

kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Arief Mulya Sugiharto SH MH kepada Gorontalo Post, Kamis (11/6/2026). Lebih lanjut Arief menegaskan, kasus yang menjerat Endi bermula pada 11 November 2021 di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan hasil persidangan,

Endi terbukti melakukan tindak pidana di bidang pangan dengan sengaja memperdagangkan pangan olahan dalam kemasan eceran tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Gto tanggal 25 Agustus 2022 menjatuhkan pidana denda sebesar Rp4 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Namun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan tersebut. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PT.Gto tanggal 10 Oktober 2022 memperberat hukuman menjadi pidana penjara selama tiga bulan.

Tak berhenti di situ, terpidana kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Pid.Sus/2023 tanggal 17 April 2023. Dengan demikian, putusan pidana penjara tiga bulan tersebut resmi berkekuatan hukum tetap. **(roy)**

Timnas Iran Tebar Ancaman

dari halaman 1

Iran tergabung di Grup G dan dijadwalkan menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 15 Juni. Setelah itu mereka akan kembali bermain di kota yang sama melawan Belgia pada 21 Juni, sebelum menutup fase grup menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni.

“Kami telah memberi tahu FIFA bahwa jika ada bendera tidak resmi yang dibawa ke stadion atau slogan yang ditujukan kepada tim nasional diteriakkan di stadion tempat Iran bermain di Piala Dunia, manajer tim tentu akan bertanggung jawab untuk menghentikan pertandingan,” kata Donyamali, Selasa, seperti dikutip media Iran.

Pelatih kepala Timnas Iran, Amir Ghalenoei (C), berbicara kepada para pemainnya selama sesi latihan di markas mereka di Antalya, pada 19 Mei 2026. Timnas Iran tiba di Turki pada 19 Mei 2026 untuk kamp pelatihan dan menyelesaikan aplikasi visa menjelang Piala Dunia 2026, kata

koresponden AFP. (Satu SAN/AFP)

Donyamali juga mengungkapkan telah menerima jaminan terkait laga melawan Mesir.

“Kami telah mendapat jaminan bahwa tidak akan ada insiden yang mengganggu di stadion selama pertandingan melawan Mesir,” ujarnya.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) dan Mesir sama-sama meminta FIFA mencegah aktivitas yang berkaitan dengan komunitas LGBTQ+ dalam pertandingan yang mempertemukan kedua negara di Seattle.

Laga tersebut ditetapkan penyelenggara lokal sebagai “Pride Match” karena bertepatan dengan rangkaian perayaan Pride Weekend di Seattle.

Kontroversi seputar Iran di Piala Dunia 2026 sebenarnya sudah muncul sejak beberapa bulan lalu. Pada April, sekelompok demonstran berkumpul di luar Kongres FIFA di Vancouver dan mendesak agar Iran dicoret dari turnamen.

Mereka menilai Timnas Iran

Mati Lambung

dari halaman 1

sampai menyembunyikan hasil dolarnya di luar negeri. Bahkan meski izin tambang itu hanya disebut kuasa tambang –pengusaha hanyalah pemegang kuasa dari pemilik tambang sebenarnya, yakni negara– tapi berani “ngakali” si pemberi kuasa. Misalnya soal kewajiban menyediakan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri: dengan mudah mereka mengabaikan. Begitu harga ekspor tinggi, penerima kuasa lebih berkuasa dari pemilik kuasa.

Pembangkit-pembangkit listrik milik negara sendiri bisa kelabakan kekurangan batu bara. Apalagi swasta. Negara begitu mudah diremehkan oleh pemegang surat kuasanya. Ironi yang luar biasa.

Kemarin, misalnya, saya dapat info listrik Jawa-Bali mulai defisit. Dugaan saya banyak pembangkit di Jawa yang mengurangi produksi karena takut stok batu bara habis sebelum batu bara yang baru tiba di gudang.

Mereka menghemat batu bara yang penting PLTU tidak mati. Begitu mati karena kehabisan batu bara perlu waktu panjang untuk start lagi.

Pemerintah pernah mengenakan denda atas pelanggaran DMO –domestic market obligation– itu. Tapi dendanya kecil sekali. Mereka pilih bayar dendanya sambil tetap mengabaikan kebutuhan dalam negeri. Mereka tega “membunuh” negaranya demi “saya dapat apa”.

Baru di pemerintahan Presiden Prabowo, dijatuhkanlah hukuman lebih berat: tahun ini izin produksi

batu bara mereka dikurangi. Ada yang dikurangi sedikit, ada yang drastis: tergantung rapor mereka.

Ternyata hukuman jenis itu masih juga belum mempan. Kebutuhan batu bara dalam negeri masih diabaikan. Hanya tambang milik kelompok usaha Sinar Mas yang punya komitmen tinggi untuk penyediaan kebutuhan dalam negeri itu.

Para pengusaha tambang tampaknya sudah lupa bahwa batu bara itu bukan milik mereka. Mereka tidak pernah melakukan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan batu bara. Tiba-tiba saja mereka memanennya –hanya karena punya izin kuasa menambangnya. Lalu mengabaikan kewajibannya pada negara.

Ketika kini pemerintah mewajibkan ekspor batu bara lewat satu pintu –lewat perusahaan negara– mereka marah bukan main. Sampai mengembangkan isu di luar negeri “betapa buruknya kebijakan ekonomi Indonesia”.

Tentu negara yang selama ini jadi tempat parkir dolar mereka ikut jadi kompor.

Dulu di zaman “emas hijau” kejadiannya juga seperti ini. Hutan dibabat. Yang tidak pernah menanam pohon tiba-tiba memanen kayu gelondongannya. Sampai semua hutan jadi gundul. Bermiliar ton kayu gelondongan diangkut ke luar negeri. Uangnya mengalir ke orang tertentu dan negara tertentu. Wilayah pemilik hutan tetap saja miskin. Dolarnya disembunyikan di luar negeri.

Tapi, di zaman emas hijau itu, tidak sampai ada istilah “ayam

mati di lambung”. Orang-orang desa di sana tidak makan kayu. Hanya hutan mereka habis. Ladang mereka diserbu monyet dan babi hutan.

Tanaman seperti singkong dan umbi-umbian ludes. Karena kampung mereka gundul, mereka pun cari makan sampai ke kampung manusia. Ikan dan udang di sepanjang sungai-sungai besar menurun drastis.

Ketika peristiwa itu kini berulang di batu bara, PLN sampai terancam seperti ayam yang akan mati di lambung. Swasta Indonesia lebih parah: sudah ada yang mati.

MBG memang harus diperbaiki. Koperasi desa merah putih harus kerja lebih rapi. Tapi ekspor batu bara satu pintu harus sukses. Dan memang pemerintah tidak mundur. Menteri Perdagangan sudah menerbitkan Permendag –saya dapatkan copy-nya kemarin.

Di situ disebutkan, izin ekspor mereka yang baru mati tahun depan dan tahun depannya lagi dipaksa berakhir tanggal 31 Desember tahun ini. Bagi yang mati sebelum itu tidak akan diperpanjang.

Misalnya ada yang mati bulan Agustus depan, mulai bulan itu pula ekspor batu baranya langsung dilaksanakan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Demikian juga yang berakhir September, Oktober, dan November. Di bulan-bulan itu ekspornya langsung diambil alih DSI.

Sangat telat melaksanakan aturan keras ini. Tapi kita sudah biasa mengatakan lebih baik telat daripada nanti-nanti lagi. (*)



MENYAMBUT PENAS - Maskapai yang melayani rute penerbangan ke Gorontalo menambah jadwal penerbangan dalam rangka menyukseskan Penas XVII di Gorontalo pada 20-25 Juni mendatang.

Maskapai Extra Flight ke Gorontalo

Sukseskan PENAS XVII, Jadwal Kapal Laut juga Berubah

GORONTALO - GP - Agenda Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan di Gorontalo pada 20-25 Juni mendatang berdampak pada meningkatnya lalu lintas penerbangan ke Gorontalo. Untuk menyukseskan acara

yang bakal diikuti belasan ribu peserta yang datang dari seluruh Indonesia itu, tiga maskapai yang melayani rute Gorontalo bahkan harus menambah jadwal tambahan atau extra flight. Tidak hanya maskapai, namun jadwal kapal laut menuju dan dari Gorontalo juga mengalami perubahan, agar bisa mengakomodir peserta Penas. Kepala Dinas Perhubungan Sagita Wartabone mengatakan,

sudah ada beberapa kontingen di pulau Kalimantan yang mengkonfirmasi kedatangannya ke PENAS. Kalimantan Utara mengirim 85 orang dengan menumpang kapal Sabuk Nusantara 97. “Dari Kaltara rencananya tiba 19 Juni 2026 dengan tol laut Sabuk Nusantara 97. Saat kembali ke kampung halaman tanggal 26 Juni harusnya tidak ada kapal yang berangkat. Atas bantuan dari Kementerian

Perhubungan kapal Sabuk Nusantara 116 yang harusnya terjadwal tanggal 23 Juni diundur hingga tanggal 26 Juni,” kata Sagita. Maskapai udara juga dilaporkan menambah penerbangan ke Gorontalo dua hari jelang acara pembukaan PENAS. Setidaknya ada enam penerbangan tambahan yang akan mengudara yakni pesawat Garuda Indonesia, Lion Air dan Batik. “Tanggal

18 dan 19 Juni penerbangan ke Gorontalo penuh. Bapak Gubernur Gusnar Ismail bermohon ke Kementerian Perhubungan untuk menambah penerbangan. Disetujui itu sehingga diberi enam extra flight. Garuda Indonesia, Batik dan Lion Air menambah penerbangan rinciannya tiga penerbangan dari Jakarta dan tiga penerbangan dari Makassar,” terangnya.

Bandara Djalaluddin Tantu juga dilaporkan sudah siap menerima kedatangan tamu dari berbagai daerah. Pengelola siap membuka layanan 24 jam jika dibutuhkan. Tamu VVIP Presiden atau Wakil Presiden disiapkan tempat di bandar lama. Kepala daerah disiapkan di ruang tunggu VIP lantai 2 sementara tamu lainnya menyesuaikan di terminal kedatangan umum. (tro)

737 Ribu Bibit Kelapa Masuk Gorontalo

GORONTALO - Kementerian Pertanian akan segera menyalurkan bantuan bibit kelapa kepada para petani di seluruh kabupaten/kotase Provinsi Gorontalo. Hal itu dipastikan oleh Gubernur Gusnar Ismail bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Fadry Djufry, saat meninjau pembibitan kelapa di Desa Dunggala, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Kamis (11/6/2026). Tahun ini Kementan mengalokasikan bantuan bibit kelapa sebanyak 737 ribu untuk lahan seluas 10 ribu hektar di Provinsi Gorontalo. Bibit kelapa

tersebut menggunakan varietas unggul lokal Gorontalo. Bantuan itu untuk mendukung pengembangan program hilirisasi tanaman kelapa. “Sekian ribu bibit ini akan digunakan untuk pengembangan tanaman kelapa dengan konsep hilirisasi. Jadi kelapa ditanam dengan bibitnya yang bagus, kemudian kita olah secara industrialisasi. Ditargetkan tiga atau empat tahun ke depan, Gorontalo akan memiliki pabrik pengolahan produk yang bahan bakunya adalah kelapa. Tidak hanya minyak kelapa, tetapi semua produk yang berasal dari buah kelapa,” kata Gusnar.

Penangkar di Desa Dunggala membibitkan kelapa sebanyak 473 ribu. Bibit tersebut dialokasikan untuk lahan seluas 4.300 hektar. Dari jumlah itu, bibit yang sudah disalurkan pada tahap pertama sebanyak 44 ribu. “Sudah ada 44 ribu bibit kelapa yang disalurkan. Penyaluran bibit kelapa ini akan dilakukan dalam tiga tahap, jadi ini sedang berproses. Secara keseluruhan bagus dan tolong dipertahankan, mudah-mudahan saat PENAS XVII bapak Menteri Pertanian bisa melihat seperti apa perkembangan bibit kelapa yang ada di sini,” pungkas Fadry. (tro)



Bibit kelapa program hilirisasi dari Kementerian Pertanian akan disalurkan ke petani di Gorontalo.

HARGA PERTAMAX NAIK Dipicu Dinamika Geopolitik Global

JAKARTA - PT Pertamina (Persero), buka suara terkait dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green pada 10 Juni 2026. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global. “Penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Simon, Kamis (11/6).

Sebagaimana diketahui, harga minyak mentah dunia terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan Investing, pada (11/6) harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik sebesar 2,26 persen menjadi USD 92,06 per barel dan kontrak berjangka Brent naik sebesar 0,09 persen menjadi USD 94,90. Simon menegaskan, Pertamina tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Peralite dan Biosolar. Ia memastikan, harga Peralite masih tetap Rp 10.000 dan BioSolar di harga Rp 6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Lanjutnya, ditengah tantangan geopolitik global yang terus bergejolak, Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia.



Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax Series dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi atau Pertamax Series. Pada Rabu (10/6/2026) harga Pertamax naik menjadi Rp 16.250 dari Rp 12.300. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan, penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Roberth menjelaskan, penyesuaian harga BBM non subsidi

mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. “Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth. (jp)

Prabowo-JK Bertemu Empat Mata di Istana



Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6).

Presiden: Jokowi Jarang ke LN juga Disalahkan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merasa heran dengan kritik publik terkait intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukannya sejak menjabat sebagai kepala negara.

Menurutnya, kritik serupa juga pernah dialami Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang justru dinilai terlalu jarang melakukan lawatan ke luar negeri.

Adapun, sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo tercatat telah menjalani 26 rangkaian perjalanan dinas ke luar negeri dengan total kunjungan 29 negara. "Jadi,

ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan 'Jokowi enggak pernah ke luar negeri.

Jokowi tidak peduli politik luar negeri" kata Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas Hipmi) XVIII di Lampung, Rabu (10/6). "Saya sering ke luar negeri, (dibilang) 'Prabowo sering ke luar negeri' Aneh.

Sebenarnya tidak ada masalah gitu, bener enggak," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, kondisi geopolitik dunia

saat ini berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Menurut dia, dinamika global yang semakin tidak menentu membuat Indonesia harus aktif menjaga hubungan dengan banyak negara. "Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung," tegasnya.

Ia menegaskan, arah politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan non-blok.

Karena itu, Indonesia memilih membangun hubungan baik dengan

berbagai negara tanpa terikat pada aliansi militer tertentu.

"Begitu saya menerima mandat sebagai Presiden, saya langsung, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh," tutur Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mencontohkan hubungannya yang tetap baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (jp)

Bahas Energi Hijau hingga Perdamaian Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6). Dalam pertemuan empat mata tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan swasembada energi hingga situasi perdamaian global.

Pertemuan itu berlangsung setelah JK lebih dulu mengajukan permohonan waktu bertemu beberapa hari sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, JK turut didampingi putranya, Solichin Kalla yang bergerak di sektor usaha. Dalam pembicaraan itu, Jusuf Kalla menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung pembangunan energi hijau berskala besar di Indonesia. Menurutnya, penguatan sektor energi menjadi salah satu kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. "Untuk meningkatkan energi, kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal

itu swasembada energi. Kita siap. Kita sudah membangun 1.500 megawatt PLTA. Ini kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG," kata JK. JK menilai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen membutuhkan pasokan energi yang memadai dan berkelanjutan. Karena itu, ia menyebut Presiden Prabowo mendukung percepatan pembangunan energi nasional, terutama yang berbasis energi hijau. "Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8 persen, yang sekarang 5-6 persen. Karena itu butuh energi yang kuat seperti itu," ujar JK.

Selain membahas energi, pertemuan tersebut juga menyinggung isu perdamaian internasional di sejumlah kawasan yang tengah menghadapi konflik dan ketegangan politik. "Seperti di Thailand, Afghanistan dan Pakistan. Itu yang kita bicarakan tadi seperti itu," pungkasnya. (jp)



Konferensi pers Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait dugaan kasus impor barang yang menyeret nama perusahaan Blue Ray, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

KASUS IMPOR BARANG

Raffi Ahmad Gandeng Hotman Bersihkan Nama

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad resmi menunjuk pengacara kondang Hotman Paris untuk memulihkan nama baiknya. Keputusan hukum tersebut diambil Raffi setelah berkonsultasi langsung dengan pihak Istana dan pimpinan DPR RI. "Saya sudah berkomunikasi sama Istana, sama Pak Seskab Teddy. Saya juga berbicara kepada pimpinan DPR, Pak Dasco," ujar Raffi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6).

Raffi mengaku menghubungi Istana dan pimpinan DPR RI tersebut untuk meminta saran setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Setelah berbicara dengan mereka, dia memutuskan mencari pengacara yang kompeten untuk mendampingi, yakni Hotman Paris. "Ya sudah, cari pengacara yang kompeten, yang benar-benar bisa membantu untuk semua ini, dan tanyakan apa langkah yang terbaik untuk membersihkan nama sendiri, nama pribadi, dan juga benar-benar jangan sampai ini terbawa ke politik," katanya.

Sementara itu, dia menjelaskan perlu memberikan

keterangan kepada publik dalam konferensi pers karena dirinya saat ini sedang mengemban amanah sebagai Utusan Presiden. "Buat saya sekarang sangat penting karena sekarang ada kepercayaan dari negara ini. Saya harus meluruskan," jelasnya. Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pada 5 Juni 2026, muncul nama Raffi Ahmad dalam persidangan terkait kunjungannya ke Kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat. KPK pada 8 Juni 2026, mengonfirmasi nama Raffi Ahmad sempat muncul dalam penyidikan kasus tersebut, terutama terkait kegiatannya yang mengunjungi Kantor Blueray Cargo untuk menitip atau mengirimkan sejumlah barang elektronik ke Indonesia. "Betul, ada fakta saudara RA (Raffi Ahmad) itu menitip," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/6). Kendati demikian, dia mengaku KPK belum mengembangkan hal tersebut lebih lanjut dalam penyidikan kasus Bea Cukai. (jpnn)

OTT KPK Suap BPK untuk Amankan Audit Proyek Smart TV

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka dugaan suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penetapan tersangka itu atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) BPK, pada Rabu (10/6). Edison juga telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap setelah terjaring OTT di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin (8/6). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan Edison diduga memberikan suap kepada BPK untuk pengondisian temuan audit dari pengadaan Smart TV atau Smart Board di Pemkab Muara Enim. Pemberian suap itu didapat dari hasil suap pihak swasta atas pengadaan Smart TV di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim. "Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK dalam rangka atau diduga untuk pengondisian ataupun pengaturan temuan audit BPK di Pemkab Muara



Bupati Muara Enim Edison mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Enim, salah satunya pengadaan Smart TV atau Smart Board yang sebelumnya pengadaannya dilakukan oleh pihak swasta tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6). Selain Edison, KPK turut menjerat Abi Nurwardani yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Abi Nurwardani sebelumnya

juga telah menyandang status tersangka dalam dugaan suap pengadaan Smart TV di Pemkab Muara Enim. "Di perkara sebelumnya dua tersangka sebagai terduga penerima suap, dalam perkara ini sebagai terduga pemberi," ujarnya. KPK juga menetapkan Titin Rita Lestari selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, serta August Dwianggara dari pihak swasta

sebagai tersangka. Keduanya diduga merupakan tersangka penerima suap dalam kasus ini. Lebih lanjut, Budi memastikan pihaknya akan mendalami dugaan suap audit BPK terkait pengadaan lainnya di Pemkab Muara Enim. "KPK tentu akan mendalami lebih luas lagi, kita akan telusuri apakah ini hanya terkait dengan pengadaan itu saja atau pengadaan-pengadaan lainnya," pungkasnya. (jp)

Wabup Pastikan Kesiapan Seluruh Lokasi PENAS



TINJAU. Wabup Tony meninjau kesiapan lokasi PENAS jelang pelaksanaan

LIMBOTO-GP-Sembilan hari jelang pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) XVII, Wakil Bupati Gorontalo melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai fasilitas dan sarana pendukung di kawasan dan pastikan seluruh fasilitas rampung sebelum pembukaan. Kamis (11/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wabup Tony meninjau sejumlah titik strategis yang menjadi pusat kegiatan PENAS KTNA XVII, mulai dari revitalisasi panggung utama, penataan Gedung Olahraga David-Tonny, rehabilitasi rumah atlet, hingga pembangunan pagar dan penataan kawasan jogging track yang menjadi bagian dari wajah utama lokasi kegiatan nasional tersebut. Tony menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target waktu tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memberikan kenyamanan bagi ribuan peserta dan

tamu yang akan datang dari seluruh Indonesia. “Kita ingin memastikan seluruh pekerjaan di kompleks GOR David-Tonny selesai tepat waktu. Namun yang tidak kalah penting adalah kualitas pekerjaan harus tetap terjaga. Fasilitas yang dibangun ini tidak hanya untuk mendukung suksesnya PENAS KTNA XVII, tetapi juga akan menjadi aset daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Tony.

Ia menjelaskan, waktu menuju pembukaan PENAS KTNA XVII kini semakin dekat. Bahkan dalam beberapa hari ke depan diperkirakan peserta dan tamu dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan ke Kabupaten Gorontalo. Karena itu, seluruh pekerjaan yang masih tersisa diminta untuk terus dipercepat agar seluruh fasilitas benar-benar siap sebelum hari pelaksanaan.

“Kita berharap revitalisasi panggung utama, penataan GOR David-Tonny, rumah atlet, hingga pagar di area jogging track dapat selesai

sesuai jadwal. Mengingat tamu dan peserta sudah mulai berdatangan minggu ini, maka progres pekerjaan harus terus dipacu sehingga saat pembukaan nanti seluruh fasilitas sudah siap digunakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia PENAS KTNA XVII Kabupaten Gorontalo, Romy Sjahrain, menyampaikan bahwa secara umum progres pekerjaan telah mencapai sekitar 90 persen. Saat ini, fokus panitia dan pelaksana kegiatan berada pada tahap penyempurnaan dan pembenahan sejumlah fasilitas pendukung agar seluruh lokasi benar-benar siap saat hari pelaksanaan.

“Alhamdulillah progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 90 persen. Saat ini tinggal beberapa pembenahan dan penyempurnaan di sejumlah titik. Target kami, tiga hari menjelang pelaksanaan seluruh persiapan sudah tuntas sehingga Kabupaten Gorontalo benar-benar siap menjadi tuan rumah yang baik dan sukses menyelenggarakan PENAS KTNA XVII,” ujar Romy.

Iya menambahkan, hari ini juga seluruh ASN di masing-masing OPD melaksanakan kerja bakti. Kemudian pada Kamis pekan depan akan dilakukan kerja bakti lanjutan secara besar-besaran di kawasan lokasi PENAS sebagai tahap akhir atau finishing.

“Ini merupakan bentuk kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyambut peserta dan tamu PENAS KTNA XVII,” pungkasnya. (Wie)



DUKUNG. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dukung penuh Pelaksanaan sensus Ekonomi

Bupati : Bangun Daerah Harus Berbasis Data Akurat

Dukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi

LIMBOTO-GP-Membangun daerah harus berbasis data yang akurat dan terpercaya, itu menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, yang secara resmi dicanangkan dan ditandai dengan pelepasan petugas sensus oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, di Hotel Amaris Gorontalo, Rabu (10/6/2026).

Bupati Sofyan Puhi menegaskan, data statistik memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Data yang

dihasilkan akan memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan struktur perekonomian daerah, mulai dari jumlah usaha, karakteristik pelaku usaha, hingga potensi ekonomi yang berkembang di setiap wilayah,” ujar Sofyan.

Ia menegaskan, hasil sensus akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mengevaluasi program yang telah berjalan, serta memastikan setiap intervensi pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Seluruh aktivitas ekonomi yang didata melalui Sensus Ekonomi ini sangat dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Data BPS menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan untuk menyusun program yang selaras dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Gorontalo. Dengan data yang akurat, pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Menurut Bupati, Kabupaten Gorontalo saat ini membutuhkan basis data ekonomi yang kuat

untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi berkembang, sekaligus memetakan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Karena itu, kualitas data yang dihasilkan melalui sensus akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dilahirkan pemerintah.

“Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk bersamasama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi kemajuan Kabupaten Gorontalo,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.

“Sensus tersebut menjadi instrumen penting untuk menyediakan data dasar yang komprehensif bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun investor dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Wie)

PEBALAP BINAAN ASTRA HONDA

Siap Melesat Kencang di Estoril

JAKARTA - Tren positif siap dilanjutkan oleh pebalap muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa. Usai mencetak debut impresif pada seri pembuka di Spanyol, pebalap asal Sleman, Yogyakarta ini fokus menaklukkan tantangan dalam putaran kedua Moto3 Junior World Championship 2026. Berlangsung di Circuito do Estoril, Portugal, akhir pekan ini pada 12-14 Juni 2026, Ramadhipa akan bersaing dalam ketatnya balapan yang diikuti 36 pebalap muda unggulan dari 16 negara. Keberhasilan menduduki posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 26 poin menjadi suntikan motivasi bagi Ramadhipa. Menunggu NSF250RW bernomor balap #32 bersama Honda Asia-Dream Racing



Ramadhipa akan bersaing dalam ketatnya balapan di Circuito do Estoril, Portugal, akhir pekan ini pada 12-14 Juni 2026.

Junior Team, pebalap berusia 16 tahun ini bertekad kembali menunjukkan konsistensi dan kecepatannya, bersaing di barisan depan grup. Sirkuit Estoril di Portugal

dikenal memiliki karakter teknis dan menyajikan tantangan kompleks bagi para pebalap. Lintasan legendaris ini menggabungkan trek lurus sepanjang hampir 1 km yang menguji kecepatan maksimal, hingga rangkaian tikungan sempit yang menuntut pebalap menjaga fokusnya di setiap lap. Faktor hembusan angin yang tak menentu di arena balap menjadi rintangan tak kasat mata bagi pebalap di Estoril.

Berbekal evaluasi dari seri pembuka di Barcelona, serta agenda dengan Honda Asia-Dream Racing Team pekan lalu melaksanakan sesi tes penting di Estoril. Ramadhipa dan tim mampu mengumpulkan data serta meracik strategi dalam menghadapi balap akhir pekan ini. “Pekan lalu kami menjalani tes yang cukup baik di Estoril.

Kondisi angin memang sangat kencang, tetapi kami berhasil mengumpulkan banyak data penting untuk mempersiapkan putaran kedua kejuaraan ini. Kami sangat termotivasi untuk memulai balapan di Portugal,” ujar Ramadhipa. Pada putaran kedua di Estoril, Ramadhipa akan menjalani sesi latihan resmi pada Jumat (12/6), dilanjutkan sesi kualifikasi pada Sabtu (13/6) yang terbagi menjadi sesi kualifikasi 1 pada pukul 13.10 dan kualifikasi 2 pukul 15.15 waktu setempat. Sementara itu, balapan utama Moto3 Junior World Championship 2026 berlangsung pada Minggu (14/6), start pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 19.00 WIB. Jalannya balapan dapat disaksikan langsung melalui tayangan live streaming di kanal YouTube resmi FIM MotoJunior. (tro)

MPP Diharapkan Akhiri Birokrasi Berbelit



Rapat kerja yang digelar di Aula I Dekot.

(F. DIYANTIGORONTALO POST)

Sherly Dukung Penguatan UMKM di Kota Gorontalo

GORONTALO-GP- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo. Karena itu, dukungan terhadap pengembangan sektor ini harus datang dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Sherly Djou, mengatakan bahwa pelaku UMKM tidak hanya berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi rumah tangga, tetapi juga membantu

pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.

“UMKM bukan hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Wakil Ketua Komisi III Dekot

Namun demikian, Srikandi Dekot itu menyoroti masih minimnya akses pasar bagi produk UMKM. Hal ini dinilai menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar usaha lokal dapat berkembang lebih maksimal.

“Kendala terbesar UMKM saat ini adalah ketersediaan pasar. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah agar pelaku usaha lokal bisa terus tumbuh dan bersaing,” jelasnya. Legislator Partai NasDem itu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sektor UMKM. Ia menyebut bahwa keberlanjutan ekonomi daerah sangat bergantung pada seberapa kuat UMKM mampu bertahan dan berkembang.

“Saya akan terus mendorong penguatan UMKM karena sektor ini adalah kunci menciptakan



Sherly Djou

ekosistem ekonomi yang inklusif dan menyejahterakan,” pungkash Sherly. (Adv)

Penanganan Sampah di Wongkaditi Timur Beralih ke Sistem Terpadu



Syafruddin Junaidi.

GORONTALO-GP- Penanganan sampah di Kota Gorontalo mulai diarahkan pada sistem terpusat guna menekan

praktik pembuangan liar yang masih kerap terjadi di sejumlah titik.

Hal ini terlihat dari pengelolaan sampah di TPS 3R Wongkaditi Timur yang mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu perubahan yang mencolok yakni penyatuan armada getor yang sebelumnya tersebar di berbagai titik kini dipusatkan dalam satu lokasi.

“Sekarang armada sudah terpusat. Semua sampah diarahkan masuk ke lokasi ini,” ujar Syafruddin Junaidi.

Ia menjelaskan, konsep TPS 3R tidak hanya

berfungsi sebagai tempat penampungan, tetapi juga menjadi pusat pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi.

Sampah yang masuk akan dipilah, diolah, hingga didaur ulang untuk kemudian dimanfaatkan kembali.

Menurutnya, sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

“Sistem ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan sekaligus

menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata,” tambahnya.

Selain berdampak pada lingkungan, keberadaan TPS 3R juga dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Proses pengolahan sampah membuka peluang pendapatan bagi para pekerja melalui hasil daur ulang yang memiliki nilai jual.

Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Gorontalo. (Adv)

Dekot Dukung Revitalisasi Gedung Belle Limbui untuk Pusat Layanan Terpadu

GORONTALO-GP - Upaya Pemerintah Kota Gorontalo menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo. Kehadiran pusat layanan terpadu tersebut dinilai menjadi solusi atas berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang selama ini masih tersebar di sejumlah instansi.

Saat ini, Pemkot Gorontalo tengah merevitalisasi Gedung Belle Limbui yang nantinya akan difungsikan sebagai Mall Pelayanan Publik. Fasilitas itu dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

Anggota Dekot Yolana Polontalo, menilai pembangunan MPP merupakan langkah strategis dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Menurutnya, birokrasi yang panjang dan tersebar di berbagai instansi kerap menjadi kendala bagi masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu, tetapi juga menambah biaya yang harus dikeluarkan warga untuk mengakses layanan pemerintah.

“Mall Pelayanan Publik akan memudahkan masyarakat karena berbagai layanan terpusat dalam satu tempat. Warga tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus dokumen atau perizinan,” ujar Yolana.

Ia menjelaskan, MPP nantinya akan menghadirkan berbagai layanan penting seperti administrasi kependudukan, pembuatan KTP, pengurusan SIM, perizinan usaha, layanan perbankan hingga layanan kesehatan. Konsep tersebut diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini dianggap kurang efektif.

Bagi pelaku usaha, kehadiran MPP juga dinilai penting untuk mendukung iklim investasi di daerah. Kemudahan dalam mengurus perizinan akan memberikan kepastian layanan sekaligus mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan dunia usaha.

Namun demikian, Yolana



Yolana Polontalo

mengingat bahwa keberhasilan MPP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan gedung atau fasilitas fisik semata. Kualitas sumber daya manusia, standar pelayanan yang jelas, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor utama yang harus diperhatikan pemerintah.

“Standar pelayanan yang jelas, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, serta fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan yang profesional dan responsif” tegas anggota Komisi II DPRD Kota Gorontalo tersebut.

Lebih jauh, kehadiran MPP juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi, proses pengawasan terhadap kinerja aparatur dapat dilakukan lebih efektif sehingga potensi penyimpangan dalam pelayanan publik dapat diminimalkan.

Selain itu, MPP akan menjadi pintu masuk bagi transformasi digital pelayanan publik di Kota Gorontalo. Berbagai layanan nantinya dirancang memanfaatkan sistem berbasis teknologi, termasuk penggunaan aplikasi digital dan tanda tangan elektronik untuk mempercepat proses administrasi.

Di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah, kehadiran Mall Pelayanan Publik menjadi momentum penting bagi Pemkot Gorontalo untuk membuktikan komitmennya dalam menghadirkan birokrasi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Dengan progres revitalisasi Gedung Belle Limbui yang terus berjalan, masyarakat kini menantikan realisasi pusat layanan terpadu tersebut sebagai wajah baru pelayanan publik di Kota Gorontalo. (Adv)

Berlangganan Koran muali dari

IDR 75.000

SCAN ME

Harian Gorontalo Post Cetak & Digital

Koran Digital

HARIAN GORONTALO POST

ANDA INGIN

Berlangganan Koran Gorontalo Post

atau

KORAN ANDA BELUM DIANTAR AHRI INI

Hubungi :

0812-4470-554

J&T CARGO GORONTALO 907A

100% Dijamin Ekonomis

0853 9448 8783 0822 9309 9280 0821 9588 2277

J&T Cargo Gorontalo Post

KIRIM CEPAT, MURAH & BISA BANYAK

Alamat : Jl. Dr. Jhon Aryo Katili No.144 Kel. Paguyaman Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo

RENUNGAN ROHANI BE RADIO - 94.3 FM SETIAP HARI 08.00 WITA

CITY HARVEST CHURCH INDONESIA - GORONTALO

JL. WOLTER MONGINSIDI
CONTACT PERSON 0435-829392
WHATSAPP : 085256276914
INSTAGRAM/FACEBOOK : C HARVEST GORONTALO
YOUTUBE : CHC INDO GTO

IBADAH RALLY PRAYER SETIAP HARI KAMIS PUKUL 19.30 WITA

IBADAH DOA FAJAR VIA ZOOM MEETING
MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI JUMAT PUKUL 05.00 WITA

BEFORE BED (DOA SEBELUM BERISTIRAHAT)
VIA ZOOM MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI SENIN DAN JUMAT PUKUL 21.00 WITA

GEREJA ANAK (CHILDREN'S CHURCH)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.30 WITA

IBADAH RAYA PAGI (LIVE STREAMING VIA YOUTUBE)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.00 WITA

IBADAH RAYA SORE (DI HOTEL ELIZABETH LIMBOTO, SAMPING POLRES)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

IBADAH STAY : STUDENT-TEENAGE-AND-YOUTH
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

PANSUS PAJAK-RETRIBUSI KUNJUNGI DITJEN

Bahas Izin Pertambangan Rakyat



PERTEMUAN Pansus Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah di Kementerian ESDM.

BUMDes Motor Ekonomi Warga

PUNCAK BOTU -GP- Komisi IV Deprov Gorontalo melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Kamis (11/6).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa.

Dalam monitoring tersebut, terungkap

bahwa BUMDes Desa Potanga telah berkembang menjadi unit usaha produktif yang tidak hanya menopang kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penampung hasil pertanian warga, mulai dari proses penggarapan hingga masa panen.

Salah satu komoditas unggulan yang dikelola adalah jagung. Dalam beberapa bulan terakhir, hasil pertanian jagung yang dikelola melalui BUMDes tercatat mencapai sekitar 33 ton, menjadi indikator positif atas penguatan sektor pertanian berbasis desa.

Selain bergerak di sektor pertanian, BUMDes Desa Potanga juga menjalankan fungsi sebagai warung serba ada (waserba) yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, sehingga memudahkan warga memperoleh sembako dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau.

Dua anggota Komisi IV yang ikut dalam kunjungan lapangan itu masing-masing Joni Dalanggo dan Sapia Tuna mengapresiasi capaian Desa Potanga dalam mengelola BUMDes secara produktif dan berkelanjutan.

"BUMDes seperti ini perlu terus diperkuat karena terbukti mampu menopang ekonomi masyarakat, membantu petani, sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan desa," ujar Joni Dalanggo.

Dengan berbagai capaian tersebut, BUMDes Desa Potanga dinilai menjadi salah satu BUMDes terbaik di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, karena mampu mengintegrasikan sektor pertanian dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa.

Joni Dalanggo berharap model pemberdayaan seperti di Desa Potanga dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. (rmb)

PUNCAK BOTU -GP- Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Deprov Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Kamis (11/6).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, didampingi Ketua Pansus H. Sun Biki beserta pimpinan dan anggota Pansus Ranperda DPRD.

Rombongan diterima oleh Cecilia Margareth, selaku Subkoordinator Perencanaan Penerimaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI.

Ketua Pansus Sun Biki menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan memastikan kesesuaian substansi pasal-pasal dalam Ranperda DPRD, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan mekanisme penerimaan daerah yang bersumber dari sektor pertambangan rakyat.

"Melalui konsultasi ini, kami ingin memastikan bahwa pengaturan dalam Ranperda memiliki landasan yang kuat, selaras dengan regulasi nasional, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah," ujar Sun Biki.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Ditjen Minerba memberikan penjelasan mengenai filosofi dan tujuan pengenaan iuran pada kegiatan pertambangan rakyat. Dijelaskan bahwa iuran pertambangan rakyat pada prinsipnya merupakan instrumen yang hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat.

Dana yang diperoleh dari iuran tersebut akan digunakan untuk berbagai kepentingan publik, antara lain pengelolaan lingkungan hidup, antisipasi serta perbaikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat penambang.

Selain itu, Pansus juga memperoleh penjelasan bahwa keberadaan iuran pertambangan rakyat bukanlah bentuk pembebanan atau upaya untuk memberatkan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan tersebut hadir sebagai instrumen untuk mendukung pengelolaan pertambangan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Menurut penjelasan Ditjen Minerba, salah satu fokus utama dari penerapan iuran tersebut adalah untuk mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan yang selama ini mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal. Pansus berharap hasil konsultasi ini dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga regulasi yang dihasilkan nantinya mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan penerimaan daerah, serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (rmb)



KUNJUNGAN Komisi IV Deprov Gorontalo ke Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Boalemo, Kamis (11/6).

PENDIDIKAN

HARIAN GORONTALO POST

JUMAT, 12 JUNI
TAHUN 2026

UNG Edukasi Siswa Soal Potensi Ikan Hulu'u

Kenalkan Manfaat Sekaligus Tumbuhkan Minat Riset Pelajar

GORONTALO-GP - Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus mendorong penguatan literasi sains di kalangan pelajar melalui pemanfaatan potensi lokal. Salah satunya dengan memperkenalkan ikan Hulu'u atau *Giuris margaritacea*, ikan khas Danau Limboto yang memiliki kandungan albumin dan berpotensi mendukung kesehatan.

Edukasi tersebut diberikan dosen Jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) UNG kepada siswa SMA Negeri 1 Paguyaman, Rabu

(10/6). Kegiatan ini menjadi sarana bagi pelajar untuk mengenal lebih dekat kekayaan hayati Gorontalo sekaligus memahami bagaimana sumber daya lokal dapat dikaji melalui pendekatan ilmiah. Para siswa tampak antusias mengikuti pemaparan materi. Mereka aktif menyimak penjelasan narasumber dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait ikan Hulu'u, kandungan albumin, serta manfaatnya bagi kesehatan.

Ketua tim, Apt. Mohomad Aprianto Paneo, M.Farm., menjelaskan bahwa ikan Hulu'u merupakan salah satu sumber daya hayati lokal yang memiliki potensi besar untuk terus diteliti dan dikembangkan.

Menurutnya, kandungan albumin pada ikan tersebut memiliki peran penting dalam proses regenerasi jaringan tubuh. Albumin juga diketahui dapat membantu mendukung proses penyembuhan luka dan pemulihan kondisi tubuh.

"Kami ingin memperkenalkan kepada siswa bahwa Gorontalo memiliki sumber daya lokal yang dapat dipelajari dan dikembangkan melalui penelitian. Ikan Hulu'u menjadi salah satu contoh karena memiliki kandungan albumin yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan," ujarnya.

Dalam kegiatan itu, siswa juga diajak memahami bagaimana ilmu farmasi berperan dalam mengkaji

bahan alam dan mengembangkan potensinya menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pelajar tidak hanya mengenal potensi daerahnya, tetapi juga memahami proses ilmiah yang melatarbelakangi pemanfaatannya.

Aprianto menambahkan, pengenalan potensi lokal kepada pelajar penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kekayaan alam daerah dapat menjadi sumber pembelajaran dan inovasi.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap dunia penelitian. Potensi daerah yang ada di sekitar mereka sesungguhnya menyimpan banyak peluang untuk

dikaji dan dikembangkan melalui ilmu pengetahuan," tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, UNG juga ingin mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya mengenal kekayaan hayati daerahnya, tetapi juga memiliki minat terhadap riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Di akhir kegiatan, para siswa diajak untuk terus belajar dan menggali potensi sumber daya lokal yang ada di lingkungan mereka. Dengan begitu, kekayaan hayati Gorontalo tidak hanya menjadi warisan yang dijaga, tetapi juga sumber inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan. (Tr-76)

Nelayan Pentadu Hilang Saat Melaut

Sudah Sepekan Belum Kembali, Tim SAR Masih Mencari

GORONTALO - GP- Dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini, masyarakat khususnya nelayan diminta untuk berhati-hati saat melaut. Seperti yang dialami seorang nelayan bernama Herman S. Ali (47), warga Dusun Pentadu, Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Semenjak dilaporkan hilang setelah tidak kembali dari aktivitas memancing di laut, Sabtu (6/6/2026). Hingga Kamis (11/6/2026), korban belum ditemukan dan masih

dilakukan pencarian tim SAR Gabungan. Sebelumnya korban diketahui berangkat melaut sekitar pukul 03.00 Wita. Menurut keterangan istrinya, Nurlin Ishak (46), korban biasanya kembali ke rumah sekitar pukul 11.00 Wita usai memancing. Namun hingga beberapa hari kemudian, korban tak kunjung pulang. Khawatir dengan kondisi tersebut, warga bersama keluarga melakukan pencarian ke lokasi rakit atau rompon yang biasa digunakan korban untuk menambatkan perahunya, sekitar 15 mil dari daratan. Di lokasi, warga menemukan perahu milik korban masih terikat di rakit, tetapi korban sudah



Proses pencarian seorang nelayan bernama Herman S. Ali (47), warga Dusun Pentadu, Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, dilaporkan hilang setelah tidak kembali dari aktivitas memancing di laut.

tidak berada di atas perahu. tersebut, Polsek Batudaa Menindaklanjuti laporan Pantai segera berkoordinasi

dengan Basarnas dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolair) Polda Gorontalo untuk melakukan operasi pencarian di sekitar perairan Kecamatan Batudaa Pantai.

Saat ini, tim gabungan dari Basarnas, Ditpolair Polda Gorontalo, dan personel Polsek Batudaa Pantai masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban. Hingga laporan ini dibuat, korban belum berhasil ditemukan. Polsek Batudaa Pantai bersama tim gabungan dari Basarnas dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolair) Polda Gorontalo melakukan upaya pencarian terhadap seorang nelayan

yang dilaporkan hilang di perairan Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.

Kapolsek Batudaa Pantai menerima laporan terkait kejadian tersebut dan segera mengerahkan personel untuk melakukan koordinasi serta langkah-langkah penanganan di lapangan. Warga yang melakukan pencarian awal menemukan perahu milik korban masih terikat di rakit atau rompon yang biasa digunakan korban, sekitar 15 mil dari daratan, namun korban tidak berada di lokasi. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan penyisiran guna menemukan keberadaan korban. (roy)

Lima PJU Polres Bonbol Dimutasi



Kapolres Bone Bolango Akbp Supriantoro, S.H., S.I.K. memimpin pelaksanaan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tiga Kapolsek, satu kabag dan satu Kasi jajaran Polres Bone Bolango yang berlangsung di lapangan Sanika Satyawada Polres Bone Bolango, Kamis (10/6).

GORONTALO - GP- Perombakan jabatan strategis di lingkungan Polres Bone Bolango kembali terjadi. Kali ini giliran Lima Pajabat Utama (PJU) dimutasi.

Adapun pejabat yang

dimutasi itu yakni Kapolsek Bulango yang sebelumnya dijabat oleh Ipda Ramin Rahim, diserahkan kepada Ipda Taufik Sapto Setiawan.

Selanjutnya jabatan Kapolsek Botu Pingge yang sebelumnya

dijabat oleh Ipda Fauzi Amrullah Sangkala diserahkan kepada Ipda Ishak Yusuf, S.H.

Sedangkan jabatan Kapolsek Bone Pantai yang sebelumnya dijabat oleh Iptu Hasan Tahir Halukoi, S.H., diserahkan kepada Akp Eldo Alrik Sibi Rawung, S.H. Dan Untuk Jabatan kabag Logistik yang sebelumnya dijabat oleh akp Muhammad Ahmad, S.H., M.H., sekarang dijabat oleh Akp Rolli, sedangkan jabatan Kasi Propam yang sebelumnya dijabat oleh Akp Eldo Alrik Sibi Rawung, S.H. sekarang di serahkan ke Iptu Hasan Tahir Halukoi, S.H.,

Kegiatan serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Wakapolres Bone Bolango, para Pejabat Utama Polres, para Kapolsek jajaran, serta personel Polres dan Polsek Jajaran wilayah daratan.

Dalam amanatnya, Kapolres Bone Bolango

Akbp Supriantoro, S.H., S.I.K menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier personel serta kebutuhan organisasi untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

“Mutasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dalam organisasi Polri.

Selain sebagai bentuk pengembangan karier personel, juga menjadi bagian dari upaya menjaga dinamika organisasi agar tetap mampu menjawab berbagai tantangan tugas yang terus berkembang,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru menerima amanah serta berharap dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru. (roy)



Mediasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan isu hoaks terkait pelecehan seksual.

Akibat Isu Pelecehan Hoaks, Nama Pria di Ilomangga Tercemar

GORONTALO - GP- Akibat informasi hoaks yang beredar luas di social media terkait tindakan pelecehan terhadap salah satu Siswi SMA di Desa Ilomangga.

Hal ini berdampak terhadap tercemarnya nama baik seorang pria inisial D di Desa tersebut. Bahkan, informasi yang belum terverifikasi tersebut menyebar luas, menimbulkan keresahan warga, dan menyudutkan nama baik keluarga yang dituduh.

Merasa keberatan dan dirugikan, orang tua dari pihak terlapor melayangkan permohonan untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Menanggapi aduan tersebut, Bhabinkamtibmas langsung bersinergi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk menggelar pertemuan tatap muka dengan dihadiri langsung Kepala Desa Ilomangga Ibu Irnawati Djafar Nusi, S.Pd., Aparat Desa, Tokoh Masyarakat serta para pihak yang terkait persoalan tersebut, Rabu, 10 Juni 2026 pukul 15.00 wita,

Setelah mendengarkan keterangan, klarifikasi, dan argumen dari masing-masing pihak secara terbuka, mediasi

membuahkan hasil kesepakatan damai. Dimana Kedua belah pihak sepakat menyudahi konflik dan menyelesaikan perkara ini secara damai tanpa jalur hukum formal.

Pihak penyebar informasi berjanji tidak akan lagi menyebarkan isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kemudian Kedua belah pihak berkomitmen menjaga hubungan baik antarwarga serta ikut serta memelihara kondusivitas di lingkungan khususnya di Desa Ilomangga. Bhabinkamtibmas Desa Ilomangga, Briпка Efendi Gusani, SH., menegaskan pentingnya kearifan dalam menanggapi informasi di era digital sebelum menyebarkannya ke publik.

“Kami mengimbau keras kepada seluruh warga agar lebih bijak, teliti, dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Jangan mudah membagikan atau meneruskan postingan yang belum jelas fakta kebenarannya, karena dampaknya sangat fatal bagi nama baik seseorang dan bisa memicu konflik sosial.” Ucap Briпка Efendi. (roy)

Warga Keluhkan Polusi Pabrik Tahu

Bikin Rumah Berdebu, Pemkab Bonbol Diminta Bertindak

GORONTALO - GP- Polusi udara berupa debu tungku pembakaran di Pabrik Tahu yang ada di Kawasan Jalan Gorontalo Outering Road (GORR) Bone Bolango memprihatinkan. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak tinggal diam. Kamis (11/6) tim gabungan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Bhabinkamtibmas menggelar mediasi sekaligus pengecekan langsung kondisi salah satu rumah warga yang diduga terdampak, yakni rumah milik Yulianti Koiyo yang diduga terdampak polusi dari limbah pabrik tersebut. Tim dibikin kaget dengan melihat kondisi rumah yang banyak debu diduga bersumber dari pembakaran tungku pabrik tahu. Hasil mediasi kemudian meminta agar kedua pihak menandatangani berita acara kesepakatan agar dalam tempo 10 hari kedepan tidak ada kejadian serta komplek serupa. Hanya saja Yulianti Koiyo selaku korban terdampak menolak menandatangani berita acara tersebut dengan alasan pihaknya meminta agar pemilik pabrik tahu dapat memperbaiki dulu sistem sanitasi pabrik mulai dari pembuangan air limbah serta debu tungku pembakaran kayu bakar juga tidak mengotori rumahnya. “Saya menolak tanda tangan berita acara kesepakatan. Sebab dalam berita acara itu pemilik pabrik diberi kesempatan

selama 10 hari untuk beroperasi, disisi lain sistem limbah pabriknya belum diperbaiki dan tentu akan berdampak ke rumah kami,” ungkap Yulianti. Lebih lanjut Yulianti mengakui sudah cukup lamamenderita menghirup asap dan debu tungku, mulai dari pembakaran ban hingga kini pembakaran kayu sebagai bahan bakar untuk memproduksi tahu. Ia meminta agar pihak Dinas maupun camat untuk tinggal di rumahnya dulu merasakan bagaimana penderitaannya selama ini menghirup udara kotor penuh dengan polusi yang tercemar karbon pembakaran tungku pabrik. “Lama-lama nyawa kami yang akan terancam, sebab tiap hari kami menghirup abu dodika (debu tungku) yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan.

Nah, siapa yang akan bertanggungjawab jika kondisi terburuk akan terjadi kepada kami,” tegas Yulianti. Ia berharap agar pihak dinas dapat menghentikan sementara seluruh aktivitas pabrik tahu tersebut sebelum SOP mengenai sistem sanitasi pabrik tersebut diperbaiki. Menurut Yulianti, pada dasarnya, pendirian sebuah pabrik tidak bisa hanya dinilai dari sisi keuntungan ekonomi sepihak. Sebuah industri tidak dapat berdiri begitu saja hanya karena dianggap menguntungkan pemilik pabrik. Ada aturan, legalitas, dan prosedurlingkungan yang wajib dipenuhi sebelum sebuah pabrik beroperasi. Hal



Mediasi terkait masalah limbah pabrik tahu di Tapa, Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan tim gabungan Dinas PTSP dan Dinas Lingkungan Hidup dihadiri camat, kades, Bhabinkamtibmas digelar di kantor Desa Bulontalangi, Tapa, Kamis (11/6).

ini penting karena masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi industri juga memiliki hak atas kenyamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik. Pendirian industri pabrik di Indonesia harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk izin usaha, kesesuaian tata ruang wilayah, dan dokumen lingkungan seperti AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL menjadi instrumen penting untuk mengkaji apakah aktivitas industri berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. “Dalam prosesnya, perusahaan wajib menyusun dokumen lingkungan, melakukan kajian dampak, menyampaikan rencana pengelolaan limbah, pengendalian kebisingan,

pengelolaan asap, hingga melibatkan masyarakat terdampak dalam proses konsultasi public,” tutup Yulianti.

Sementara itu Kadis PTSP Dian Susilo saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah melakukan mediasi antar pemilik pabrik tahu dan masyarakat yang terdampak. Dan hasil mediasi meminta pihak pemilik pabrik tahu dan warga terdampak untuk menandatangani kesepakatan pemberian kesempatan waktu selama 10 hari kepada pemilik pabrik tahu untuk memperbaiki sistem sanitasi pabrik. “Jika masih ada komplain dari masyarakat akibat limbah pabrik, maka pihak dinas akan memberikan sanksi yang lebih tegas,” tandas mantan kadis sosial Bone Bolango itu. (roy)

Ketika Gen Z Emoh Berpolitik

JANGAN pernah sebut Gen Z sebagai “penentu masa depan bangsa” jika setelah surat suara dicoblos, aspirasi mereka langsung dibuang ke tempat sampah. Bagi anak muda hari ini, panggung politik tak lebih dari sekadar sirkus musiman yang melelahkan: tiketnya mahal, aktornya manipulatif, dan penontonnya selalu berakhir ditipu. Maka ketika gelombang anak muda memilih untuk *emoh* alias ogah peduli lagi pada politik, itu bukanlah tanda kebodohan, melainkan sebuah bentuk perlawanan paling waras terhadap sistem yang sudah lama membusuk.

Berdasarkan data KPU RI pada Pemilu 2024 lalu, dominasi generasi Milenial danZ mencapai angka 55% atau sekitar 114 juta pemilih dari total daftar pemilih tetap. Proyeksi menuju Pemilu 2029 bahkan lebih masif, di mana Gen Z bersama Gen Alfa diprediksi menjadi penentu utama dengan estimasi mencapai 70% dari total pemilih. Angka ini adalah sebuah “kekuatan super” dalam demokrasi. Namun, di balik angka yang menggiurkan tersebut, ada bara api yang menyala, yakni*political cynicism* (sinisme politik) yang kian akut. Gen Z bukannya tidak tahu politik, mereka justru terlalu tahu, dan karena itulah mereka memilih untuk *emoh* atau ogah terseret dalam sirkus politik yang dianggap manipulatif.

Kontradiksi Kesadaran dan Sinisme Politik

Fenomena *emoh* berpolitik ini melahirkan paradoks yang menarik. Survei dari Populi Center dan CSIS secara konsisten menunjukkan tingginya tingkat literasi politik dan kepedulian Gen Z terhadap masa depan demokrasi. Artinya, mereka tidak bodoh dan tidak buta. Namun, kesadaran tinggi ini justru berbanding lurus dengan skeptisisme

terhadap institusi pemerintah dan para aktornya.

Hari ini, kita menyaksikan bagaimana tajamnya sorotan GenZ terhadap performa pejabat publik yang dinilai tidak sesuai janji kampanyenya atau sikapnya yang tidak berpihak kepada rakyat. Figur-figur seperti Prabowo Subianto,Gibran R. Raka ,Sugiono, Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia, hingga Gus Ipul tak luput dari radar kritik tajam anak muda. Ketika ekspektasi terhadap kabinet yang profesional (*meritocracy*) berbenturan dengan realitas kabinet yang terlalu gemuk, utang negara yang melambung, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, di situlah sinisme politik mengkristal menjadi sebuah sikap apolitis.

Sebagaimana dijelaskan oleh Brady, Verba, dan Schlozman (1995) dalam *Beyond SES: A Resource Model of Political Participation*, partisipasi politik bersandar pada tiga jawaban mengapa seseorang memilih absen dari politik: karena mereka tidak mampu (*can’t*), tidak mau (*don’t want to*), atau tidak ada yang mengajak (*nobody asked*).

Dalam konteks Gen Z hari ini, absennya mereka dari panggungpolitikkonvensional bukan lagi sekadar perkara tidak mampu atau tidak ada yang mengajak, melainkan sebuah penegasan sadar bahwa mereka *don’t want to*. Gerakan *emoh* berpolitik ini adalah representasi dari runtuhnya motivasi mereka akibat *political cynicism*. Ketika Gen Z melihat pemerintahannya manipulatif, mereka secara rasional memilih untuk menarik diri. Bagi mereka, terlibat dalam sistem yang korup secara struktural hanyalah sebuah kesia-siaan.

Manifesto Perlawanan

Sinisme Gen Z bukan sekadar omong kosong di warung kopi, melainkan telah termanifestasi dalam tindakan-tindakan



Oleh : Ali Mursyid Azisi

nyata yang menggetarkan stabilitas narasi penguasa. Manifesto perlawanan ini berupa maraknya aksi protes terhadap janji kesejahteraan ekonomi-pendidikan. Sebagian menganggap pemilu sekadar komoditas partai. Kritik terhadap *nepo babies* dan *flexing* pejabat-anak pejabat di tengah krisis ekonomi menjadi sasaran empuk. Begitu pula gerakan *cyber-activism*seperti #kawalputusanMK #resetindonesia dan #indonesiagelap bergema secara organik tanpa komando struktural.

Ketika jalur digital buntu, Gen Z turun ke jalan. Mereka menjadi motor penggerak protes menuntutketidakadilan dan penolakan pemborosan anggaran. Sayangnya, bentrokan dengan aparat justru memperdalam krisis legitimasi antara pemuda dan negara. Gelombang demonstrasi Agustus 2025 lalu memicu penangkapan massal, dan Gen Z mendominasi hingga 88.45% dari total 703 tahanan politik yang tercatat pasca-

aksi. Begitu pula “*no viral, no justice*” adalah bentuk kebobrokan negara. Gen Z muak dengan pemerintah yang baru mendengarkan setelah publik marah.

Kemarahan lainnya adalah kritik terbuka terhadap kebijakan ekonomi Presiden, mulai dari anggaran jumbo MBG, PSN, impor, hingga merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS. Yang paling ekstrem dan mengerikan dari sinisme ini adalah hilangnya rasa kemanusiaan pada kasus kecelakaan Gus Hilman, anggota DPR RI muda, di Tol Pasuruan-Probolinggo. Kolom komentar media mainstream dipenuhi kalimat-kalimat mengerikan seperti “*kok gak DPR-nya aja sih yang mati?*”. Ini adalah tanda bahaya bahwa luka batin dan kebencian sosial terhadap simbol kekuasaan sudah berada di tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Mengapa Mereka Begitu Sinis?

Akar penyebab sinisme ini tidak tumbuh dalam semalam. Pertama, terjadi krisis kepercayaan (*crisis of trust*). Partai politik dan politisi dianggap hanya mendekati anak muda demi suara saat pemilu, kemudian mencampakkan aspirasi mereka setelah kursi kekuasaan diraih. Russell J. Dalton dalam bukunya *The Good Citizen: How a Younger Generation is Reshaping American Politics* (2019) menjelaskan bahwa pergeseran dari “*dutycitizen*” (warga negara yang patuh karena kewajiban) menjadi “*engaged citizen*” (warga negara yang kritis dan menuntut hak) membuat generasi muda sangat sensitif terhadap inkonsistensi moral para pemimpinnya.

Kedua, ada isu struktural dan kesenjangan ekonomi. Ketika politik tidak mampu menyelesaikan masalah riil seperti keadilan sosial dan masa depan ekonomi, maka politik kehilangan relevansinya bagi anak muda. Ketiga, paparan informasi tanpa batas. Sebagai *digital natives*, Gen

Z memiliki kemampuan tinggi untuk melacak rekam jejak digital seorang tokoh(*slacktivism*). Janji palsu dan kemunafikan politik sangat mudah dikuliti hanya dalam hitungan detik.

Merajut Kembali Harapan Demokrasi

Sikap *emoh* politik ini bagai pisau bermata dua bagi masa depan demokrasi Indonesia. Di satu sisi, jika apatisme ini dibiarkan meluas hingga berujung pada tingginya angka golput, kualitas demokrasi elektoral kita akan keropos karena kehilangan legitimasi dari mayoritas populasinya sendiri. Di sisi lain, skeptisisme kritis mereka sebenarnya adalah bentuk kontrol sosial yang sangat kuat dan sehat untuk menjaga jalannya roda pemerintahan agar tidak melenceng menjadi otoriter.

Menariknya, harapan itu sebenarnya belum sepenuhnya mati. Gen Z tidak benar-benar benci pada konsep negaranya, mereka hanya muak pada cara para elit mengelolanya. Solusinya bukan dengan memaksa mereka masuk ke dalam sistem, melainkan mereformasi sistem politik itu sendiri. Pemerintah dan partai politik harus membuka ruang sosial yang inklusif, mengedepankan meritokrasi, menghentikan praktik dinasti yang ugul-ugalan, dan membuktikan kinerja melalui kebijakan yang berorientasi pada masa depan generasi muda. Jika panggung politik tidak segera berbenah, jangan salahkan jika suatu hari nanti, 114 juta anak muda benar-benar berbalik arah, meninggalkan panggung yang sepi, dan membiarkan demokrasi kita mati dalam kesunyian. (*)

Founder The Indonesian Foresight Research Institute (IFRI) & Pengamat Sosial-Politik,

Kebangkitan Ekonomi Gorontalo

Oleh : Hendri Cahyo Dwi Safitri, SST, MSE

DINAMIKA perekonomian suatu wilayah terbentuk dari akumulasi berbagai kebijakan, investasi, dan peristiwa ekonomi yang berlangsung dari masa ke masa. Dampaknya pun tidak selalu dirasakan secara langsung, sebagian memengaruhi perekonomian dalam jangka pendek, sementara sebagian lainnya baru terlihat dalam jangka panjang. Karena itu, memahami perjalanan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya melihat capaian terkini, tetapi juga perlu menelusuri dinamika historis yang membentuknya hingga hari ini.

Belasan tahun yang lalu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pernah berada pada kisaran 7 persen. Pada tahun 2010, ekonomi Gorontalo tumbuh sebesar 7,56 persen, kemudian meningkat menjadi 7,71 persen pada tahun 2011 dan mencapai 7,91 persen pada tahun 2012. Selanjutnya, pertumbuhan tercatat sebesar 7,67 persen pada tahun 2013 dan 7,27 persen pada tahun 2014. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut Gorontalo termasuk daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Pada periode 2015 hingga sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Gorontalo masih relatif kuat, meskipun berada pada kisaran 6 persen, yaitu 6,22 persen pada 2015; 6,52 persen pada 2016; 6,73 persen pada 2017; 6,49 persen pada 2018; dan 6,40 persen pada 2019. Namun, pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar terhadap perekonomian sehingga pada tahun 2020 ekonomi Gorontalo mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen.

Pascapandemi, perekonomian Gorontalo mulai menunjukkan pemulihan

secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,40 persen pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 4,03 persen pada 2022, 4,50 persen pada 2023, 4,13 persen pada 2024, dan kembali menguat hingga mencapai 5,71 persen pada tahun 2025. Apabila dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025, yaitu tumbuh sebesar 7,50 persen.

Sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada periode pascapandemi, yakni tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Gorontalo masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut berubah pada tahun 2025, ketika pertumbuhan ekonomi Gorontalo berhasil melampaui nasional. Pada tahun tersebut, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,11 persen, sedangkan Gorontalo mencapai 5,71 persen.

Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih fluktuatif karena dipengaruhi pola musiman. Berbeda dengan data yang telah disesuaikan terhadap faktor musiman (*seasonally adjusted*), publikasi PDB dan PDRB triwulanan masih mencerminkan pengaruh musim, sehingga variasi pertumbuhan antartriwulan cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahunan.

Pada masa sebelum pandemi Covid-19, ekonomi Gorontalo dalam beberapa triwulan mayoritas tumbuh di atas 6 atau 7 persen, bahkan beberapa kali melampaui 8 persen. Pola tersebut mulai kembali terlihat pada rilis terbaru yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Gorontalo, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 7,68 persen. Capaian

ini memberikan optimisme terhadap peluang pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara tahunan pada tahun 2026.

Secara struktur ekonomi, Gorontalo masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang lebih dari sepertiga struktur perekonomian daerah. Selain memiliki peran dominan, kategori ini juga tumbuh sebesar 4,12 persen pada triwulan I 2026. Kondisi tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya produksi komoditas unggulan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo pada Februari 2026, hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan bahwa potensi luas panen jagung pipilan periode Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 42,35 ribu hektare. Angka tersebut meningkat 7,51 persen dibandingkan periode Januari-Maret 2025 yang sebesar 39,39 ribu hektare.

Metode KSA dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sekarang bergabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengestimasi luas panen jagung berdasarkan pengamatan yang objektif (*objective measurement*). KSA memanfaatkan teknologi citra satelit resolusi sangat tinggi yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), kemudian diolah oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) menggunakan metode *Cylindrical Equal Area* (CEA) untuk dilakukan pemilahan dan deliniasi antara lahan baku sawah

dan bukan sawah.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tidak hanya dipicu oleh tumbuhnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor dominan, tetapi juga didukung oleh aktivitas pertambangan emas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan. Beberapa kategori lapangan usaha yang tumbuh signifikan pada triwulan I 2026 antara lain Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,34 persen, Industri Pengolahan sebesar 29,34 persen, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,25 persen. Tingginya pertumbuhan pada kategori-kategori tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi, distribusi, dan mobilitas ekonomi di Gorontalo.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya menggambarkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Karena itu, pertumbuhan yang tinggi menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan, distribusi, hingga mobilitas masyarakat dalam perekonomian.

Peraih Nobel Ekonomi tahun 1981, James Tobin, pernah mengatakan:

“The question of growth is nothing new but a disguise for an age-old issue, one which has always intrigued and preoccupied economics, the present versus the future.”

Momentum pertumbuhan Gorontalo pada triwulan I 2026 menunjukkan bahwa perekonomian daerah mulai kembali menemukan ritme pertumbuhan tinggi seperti pada periode sebelum pandemi Covid-19. Penguatan sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah, disertai meningkatnya aktivitas industri

pengolahan, pertambangan, dan transportasi, menjadi sinyal positif bagi arah pemulihan ekonomi Gorontalo ke depan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh tingginya konsumsi saat ini, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam menciptakan investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Wilayah yang mampu menjaga akumulasi modal dan produktivitas umumnya akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dalam jangka panjang. Dalam perspektif model pertumbuhan Solow, akumulasi modal pada periode sebelumnya menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2025, Kabupaten Pohuwato menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Gorontalo. Hal tersebut mengindikasikan adanya aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong peningkatan output daerah. Namun demikian, tantangan pembangunan tidak berhenti pada tingginya angka pertumbuhan semata.

Pada akhirnya, kebangkitan ekonomi Gorontalo tidak hanya diukur dari seberapa besar pertumbuhan yang tercapai, tetapi juga dari seberapa luas manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesempatan kerja yang setara, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang perlu terus dijaga dalam proses pembangunan daerah. (*)

Penulis adalah Statistisi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO

GORONTALO Post

Penerbit : PT. GORONTALO CEMERLANG
Pembina : Dahlan Iskhan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

■ DIVISI PRODUKSI

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi**: Deice Pomalingo, Caesar Ntoma, Diyanti T. Niyode, Sekretaris Redaksi: Agustina Said. **Koordinator HRD**: Chicilia Noviausti Arifin. **Koordinator IT**: Aslan Akuba

■ DIVISI ART & PERWAJAHAN

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis**: Muhammad Syukri

■ DIVISI USAHA

Manager Keuangan: Elvin Ambo. **Adriyanti Kadir (adm)**. **Manager Iklan**: Hariyanto Hamzah.

Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad **Design Iklan**: Oman Nasiboe.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. **Pemasaran Koran**: Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

■ LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil**: Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial**: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran**: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

■ ALAMAT

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@ymail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa Timur.



(FOTO DOK)
KETUA DPRD Bonbol Faisal Yunus berpose bersama forkopimda usai upacara hari pancasila belum lama ini.

Mendatangkan Manfaat, Pembangunan Harus Optimal

TILONGKABILA - GP - Pembangunan yang pro rakyat masih menjadi harapan terbesar agar hasilnya ke depan mampu mendatangkan asas manfaat yang besar dalam menunjang kemajuan daerah. Hal inilah yang menjadi keinginan Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango, Sofyan Wahidji. Kepada awak media belum lama ini, ia mengatakan bahwa arah dan tujuan pembangunan daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan kemajuan daerah di berbagai sektor.

Menurut Sofyan, tujuan tersebut selama ini terus diupayakan melalui optimalisasi fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang didanai melalui APBD Tahun 2026. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada tahap perencanaan, tetapi juga mencakup pelaksanaan hingga hasil akhir dari program yang dijalankan. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Karena itu, implementasi kinerja pengawasan di lapangan harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan fisik maupun program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, pengawalan yang optimal juga menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Sehingga apa yang menjadi tujuan dari rencana awal dapat benar-benar menyentuh dan dipergunakan sebaiknya oleh masyarakat,” ujar Sofyan Wahidji belum lama ini. Ia berharap seluruh program pembangunan yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. (csr)

Bayar Guru PPPK Paruh Waktu Lewat Dana BOS

Rachmatiyah Sebut Melegakan Jawab Kekhawatiran

TILONGKABILA-GP - Kekhawatiran daerah yang tidak mampu membayar gaji guru PPPK paruh waktu akhirnya menemui titik terang. Ini menyusul kabar soal adanya relaksasi pembayaran tenaga guru paruh waktu dari kementerian.

Kabar tersebut menjadi angin segar bagi pemerintah daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran tenaga guru paruh waktu.

Kabar itu tentu disambut gembira Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rachmatiyah

Deu, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan sejumlah informasi penting, termasuk kebijakan terbaru dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembayaran tenaga guru PPPK paruh waktu.

Usai pertemuan, Rachmatiyah menjelaskan bahwa saat RDP berlangsung, Dinas Pendidikan membawa kabar gembira yang menurutnya cukup melegakan terkait pembayaran tenaga guru paruh waktu. Pasalnya, selama ini terdapat kekhawatiran daerah hanya mampu membayar gaji selama enam bulan dan harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat untuk menutupi kebutuhan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.

Menurutnya, kekhawatiran itu kini terjawab setelah keluarnya kebijakan yang memperbolehkan penggunaan dana BOS untuk pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu. Dengan demikian, daerah dapat melakukan sharing pembayaran untuk enam bulan berikutnya melalui pemanfaatan dana BOS.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat berjalan lancar sesuai harapan, sementara kebutuhan yang tidak terakomodasi melalui dana BOS dipastikan akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan. “Salah satu poin besar yang mereka bawa adalah kabar cukup melegakan bahwa tahun ini keluar relaksasi dari kementerian terkait pembayaran tenaga guru paruh waktu bisa menggunakan dana BOS,” ujar aleg yang biasa disapa Kaka Tia itu. (csr)

Bangkit Bersama dengan Bersinergi

TILONGKABILA - GP - Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Yunus, mendorong eksekutif dan legislatif untuk terus mempertahankan iklim kerja yang solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, kekompakan antara kedua lembaga tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan, sinergi yang terbangun dengan baik diperlukan untuk menyatukan tekad dan semangat bersama dalam

membangun Bone Bolango ke arah yang lebih baik. Dengan adanya kesamaan visi dan tujuan, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurut Faisal, iklim kerja yang solid harus selalu bermuara pada prinsip kerja yang pro rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun program yang dijalankan akan lebih fokus pada kepentingan masyarakat. Selain itu, hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif

juga akan turut menentukan kemajuan pembangunan daerah serta memperlancar penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik.

“DPRD dan Pemerintah Daerah harus bangkit bersama untuk bersinergi baik dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Bone Bolango ke depan,” ujarnya belum lama ini. Ia berharap semangat kebersamaan tersebut terus terjaga sehingga berbagai program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan mampu mendorong kemajuan daerah secara optimal. (csr)

Golkar Komitmen Memperkuat Peran Indonesia di Tingkat ASEAN

JAKARTA - Ketua DPP Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut partainya berkomitmen menguatkan peran politik Indonesia di level regional setelah menghadiri ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Selasa (9/6). Dave menyebut Golkar sebagai langkah awal bakal memperkuat kerja sama antarpantai di ASEAN yang menjadi instrumen strategis dalam diplomasi politik. “Sejalan dengan pandangan Vietnam bahwa penguatan hubungan antarpantai merupakan kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan,”

kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (11/6).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyebutkan agenda AFF 2026 menegaskan komitmen Golkar melaksanakan konsolidasi internal dan modernisasi. Termasuk, kata Dave, menguatkan kaderisasi berbasis merit, digitalisasi komunikasi politik, serta adaptasi terhadap isu lintas batas seperti energi dan teknologi. “Golkar menekankan posisi Indonesia dalam geopolitik regional melalui strategi diplomasi ekuidistan,” ujarnya. Dave mengatakan AFF 2026 dalam konteks narasi yang berkembang, dipakai

Golkar untuk membangun diplomasi berbasis masyarakat. Golkar berkomitmen menjaga keseimbangan geopolitik melalui strategi ekuidistan yang memperkuat peran Indonesia di ASEAN,” katanya.

Dia menegaskan Golkar ke depan tidak hanya berorientasi pada politik nasional, melainkan berperan strategis di tingkat ASEAN. “Dengan demikian, Partai Golkar tampil di Vietnam pasca-ASEAN Future Forum 2026 sebagai aktor politik yang menyeimbangkan kepentingan domestik dan regional,” ujarnya. (jppn)



KETUA DPP Golkar Dave Laksono (dua dari kiri) saat hadir acara ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Selasa (9/6).



Perkuat Ketahanan Sosial Keluarga KPM PKH di Liluwo Diberi Edukasi

GORONTALO - GP - Upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo melalui berbagai program pemberdayaan dan edukasi.

Salah satunya diwujudkan lewat kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo tersebut, tidak hanya menghadirkan materi penguatan ketahanan sosial, tetapi juga dirangkaikan dengan silaturahmi bersama warga serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta.

Acara dibuka oleh Camat Kota Tengah, Sutami Suratinoyo. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi antusiasme para penerima manfaat PKH yang hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Menurut Sutami, penguatan ketahanan sosial menjadi salah satu langkah penting dalam membangun keluarga yang tangguh menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.

“Program seperti ini sangat penting karena memberikan pengetahuan, pendampingan, sekaligus layanan yang langsung dirasakan masyarakat. Harapannya, peserta dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah kecamatan bersama pihak terkait terus berupaya memastikan pelaksanaan kegiatan serupa dapat menjangkau lebih banyak warga. Untuk itu, koordinasi lintas sektor dilakukan agar setiap program pembinaan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, termasuk tenaga kesehatan dan perwakilan Densus 88 Antiteror Polri yang memberikan edukasi mengenai upaya pencegahan paham radikal serta pentingnya menjaga keamanan lingkungan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat kepedulian sosial, serta membangun lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (adv)

POSISI KAS DAERAH PER 10 Juni 2026		
I Posisi Saldo Kas BUD per 09 Juni 2026 :		51.424.796.382,72
- Penerimaan Kas Daerah per 10 Juni 2026	1.607.495.580,00	
- Pengeluaran Kas Daerah per 10 Juni 2026	329.658.549,00	
II Saldo Akhir per 10 Juni 2026		52.702.633.413,72

Gorontalo, 11 Juni 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO
SELAKU BUD
Ttd
NURYANTO, Ak.M, Ec.Dev, CA
PEMBAH UTAMA MUDA

TRANSAKSI STREET FOOD JILID II

Tembus Hampir Setengah Miliar Rupiah



Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel ketika melakukan audiens dengan UNBITA Gorontalo, Kamis (11/6/2026).

Tanpa Sertifikat Mengaji Pendaftaran SMP Tetap Dibuka dengan Ketentuan Khusus

GORONTALO - GP - Pemerintah Kota Gorontalo kembali menekankan pentingnya pendidikan agama dalam proses penerimaan murid baru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2026.

Salah satu ketentuan yang diberlakukan adalah kewajiban bagi calon peserta didik untuk memiliki sertifikat belajar mengaji sebagai bagian dari persyaratan administrasi.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki dasar keagamaan yang kuat.

Program ini sejalan dengan perhatian besar Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel terhadap pembinaan karakter anak sejak usia dini.

Menurut pemerintah daerah, kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan bekal penting yang perlu dimiliki peserta didik sebelum



Surat edaran kebijakan calon siswa SMP tanpa sertifikat mengaji.

memasuki jenjang pendidikan menengah pertama.

Maka dari itu, pendidikan agama terus didorong berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan formal.

Penegasan terkait ketentuan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo tertanggal 10 Juni 2026. Surat itu disampaikan kepada para lurah, pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ), serta orang

tua santri di seluruh wilayah Kota Gorontalo.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa siswa yang belum mengantongi sertifikat mengaji tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.

Orang tua atau wali hanya diwajibkan membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk membimbing dan mengikutsertakan anak dalam kegiatan belajar mengaji melalui TPA atau TPQ.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong keterlibatan keluarga dalam pembentukan karakter dan pendidikan keagamaan anak.

Pemerintah Kota Gorontalo berharap kebijakan tersebut mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi, berakhlak mulia, serta memiliki pemahaman agama yang baik sebagai fondasi menghadapi perkembangan zaman. (adv)

GORONTALO - GP - Gelaran Street Food Jilid II yang berlangsung di kawasan Rumah Adat Dulohupahing SMP Negeri 7 Kota Gorontalo kembali membuktikan diri sebagai ajang yang mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hingga memasuki hari ketiga pelaksanaan, total transaksi yang berhasil dibukukan para pelaku usaha mencapai Rp495.897.752. Nilai tersebut mendekati angka setengah miliar rupiah dan melampaui capaian kegiatan serupa pada penyelenggaraan sebelumnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, Muttakin Adam, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap event kuliner yang kini menjadi salah satu agenda favorit warga.

“Pendapatan UMKM sampai hari ketiga sudah mencapai sekitar Rp495 juta. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Street Food Jilid I,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun panitia, perolehan omzet Street Food Jilid II meningkat sekitar Rp43 juta dibandingkan penyelenggaraan pertama yang mencatat transaksi sebesar Rp452,8 juta.

Menurut Muttakin, capaian tersebut berpotensi lebih besar apabila kondisi cuaca selama pelaksanaan kegiatan mendukung sepenuhnya. Hujan yang sempat turun pada hari ketiga dinilai mengurangi jumlah pengunjung dan aktivitas transaksi.

Menariknya, peningkatan omzet terjadi meskipun area pelaksanaan tahun ini jauh

lebih ringkas. Jika pada Street Food Jilid I lokasi kegiatan membentang hingga sekitar dua kilometer, kali ini kawasan yang digunakan hanya sepanjang kurang lebih 407 meter.

Tingginya transaksi juga didukung oleh meningkatnya partisipasi pelaku usaha. Pada hari pertama, sebanyak 249 UMKM tercatat berjualan, lebih banyak dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang hanya diikuti 216 UMKM pada hari pembukaan.

Hari pertama sekaligus menjadi penyumbang transaksi terbesar dengan nilai penjualan mencapai Rp222,3 juta.

Angka tersebut jauh melampaui capaian hari pertama Street Food Jilid I yang berada di kisaran Rp139 juta.

Secara keseluruhan, terdapat 307 UMKM yang mendaftarkan diri pada Street Food Jilid II, dengan 282 di antaranya aktif berpartisipasi selama kegiatan berlangsung.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Street Food tidak hanya menjadi ruang promosi bagi produk lokal, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha kecil.

Tingginya kunjungan masyarakat serta bertambahnya jumlah peserta menjadi indikator bahwa event ini semakin diminati dan memiliki dampak nyata terhadap pengembangan UMKM di Kota Gorontalo.

Dengan capaian transaksi yang terus meningkat, Street Food Kota Gorontalo dinilai semakin efektif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi kerakyatan sekaligus wadah promosi bagi produk-produk unggulan daerah. (adv)



Suasana Street Food Jilid II yang diselenggarakan Pemkot Gorontalo.

VR125 STREET

SPECIAL CASHBACK

Rp 700.000,-

*Syarat dan ketentuan berlaku